

**ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SUBSIDI
PUPUK PADA PETANI PADI DI KABUPATEN WAJO**

**Mukmin
G021 17 1033**



**DEPARTEMEN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK PADA PETANI PADI DI
KABUPATEN WAJO**

**MUKMIN
G021171033**

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pertanian
Pada
Departemen Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian
Universitas Hasanuddin
Makassar



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
DEPARTEMEN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

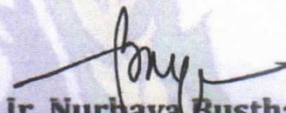
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi Di Kabupaten Wajo

Nama : Mukmin

Nim : G021171033

Disetujui Oleh:


Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, M.S.
Pembimbing Utama


Dr. Ir. Nurbaya Busthanul, M.Si.
Pembimbing Pendamping

Diketahui Oleh :


Dr. A. Nixia Tenriawaru, S.P., M.Si.
Ketua Departemen

Tanggal Lulus : 16 Juni 2022

**PANITIA UJIAN SARJANA PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
DEPARTEMEN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**JUDUL : ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK PADA
PETANI PADI DI KABUPATEN WAJO**

NAMA : MUKMIN

STAMBUK : G021 17 1033

SUSUNAN PENGUJI

**Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, M.S.
Ketua Sidang**

**Dr. Ir. Nurbaya Busthanul, M.Si.
Anggota**

**Prof. Dr. Ir. Mujahidin Fahmid, M.T.D.
Anggota**

**Dr. Letty Fudjaja, S.P., M.Si.
Anggota**

Tanggal Ujian : 16 Juni 2022

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi Di Kabupaten Wajo" benar adalah karya saya dengan arahan tim pembimbing, belum pernah diajukan atau tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Saya menyatakan bahwa, semua sumber informasi yang digunakan telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Makassar, 16 Juni 2022



ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK PADA PETANI PADI DI KABUPATEN WAJO

Mukmin¹, Didi Rukmana², Nurbaya Busthanul³

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

²Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

³Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

*Corresponding Author: mukminbs99@gmail.com

ABSTRAK:

Kebijakan subsidi pupuk merupakan suatu program pemerintah dengan tujuan untuk mendukung sektor pertanian dengan memberikan subsidi input melalui penetapan harga eceran tertinggi subsidi pupuk. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan prosedur pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk dan menganalisis efektivitas kebijakan subsidi pupuk pada petani padi di Kabupaten Wajo dengan menggunakan empat indikator efektivitas kebijakan subsidi pupuk yaitu tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat tempat. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Dalam penelitian ini, penentuan sampel menggunakan teknik *Cluster Sampling* dengan metode *Two-Stage Cluster Sampling* yang dimana pengambilan sampel dilakukan secara dua tahap. Metode analisis data yang digunakan untuk mendeskripsikan prosedur pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk yaitu analisis deskriptif sedangkan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis efektivitas kebijakan subsidi pupuk yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini berdasarkan tujuan pertama yaitu prosedur pelaksanaan penyaluran pupuk subsidi terlaksana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan dan tujuan kedua yaitu tingkat efektivitas kebijakan subsidi pupuk berdasarkan empat indikator keberhasilan secara keseluruhan dengan rata – rata indikator sebesar 46,46 persen sehingga dapat dikategorikan tidak efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Prosedur, Kebijakan Subsidi Pupuk.

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE FERTILIZER SUBSIDY POLICY ON RICE FARMERS IN WAJO DISTRICT

Mukmin¹, Didi Rukmana², Nurbaya Busthanul³

¹Agribusiness Study Program, Faculty of Agriculture, Hasanuddin University Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

²Agribusiness Study Program, Faculty of Agriculture, Hasanuddin University Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

³Agribusiness Study program, Faculty of Agriculture, Hasanuddin University Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

*Corresponding Author: mukminbs99@gmail.com

ABSTRACT:

The fertilizer subsidy policy is a government program with the aim of supporting the agricultural sector by providing input subsidies through setting the highest retail price for fertilizer subsidies. The purpose of this study is to describe the procedure for implementing the fertilizer subsidy policy and analyze the effectiveness of the fertilizer subsidy policy on rice farmers in Wajo Regency using four indicators of the effectiveness of the fertilizer subsidy policy, namely the right price, the right amount, the right time, and the right place. This study uses a survey method with a qualitative and descriptive approach. In this study, the determination of the sample used the Cluster Sampling with the Two-Stage Cluster Sampling in which the sampling was carried out in two stages. The data analysis method used to describe the procedure for implementing the fertilizer subsidy policy is descriptive analysis, while the data analysis method used to analyze the effectiveness of the fertilizer subsidy policy is descriptive qualitative analysis. The results of this study are based on the first objective, namely the procedure for distributing subsidized fertilizers carried out in accordance with the implementation instructions that have been set and the second objective, namely the level of effectiveness of the fertilizer subsidy policy based on four indicators of overall success with an average indicator of 46.46 percent so that it can be categorized as not effective.

Keywords: Procedure, Fertilizer Subsidy Policy.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Mukmin, lahir di Toddang Kalung, pada tanggal 18 Maret 1999 merupakan anak ke tujuh dari pasangan Abdul Rasyid dan Ufe dari delapan bersaudara. Selama hidupnya, penulis telah menempuh beberapa pendidikan formal, yaitu :

1. SDN 388 Lempong, Kabupaten Wajo Tahun 2005 – 2011;
2. SMP Nurmilad Boarding School, Kabupaten Wajo Tahun 2011 – 2014;
3. SMA Nurmilad Boarding School, Kabupaten Wajo Tahun 2014 – 2017;
4. Mahasiswa di Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 2017 untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S1).

Selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin penulis mendapatkan beasiswa Sarjana Muamalat sebagai pendukung kegiatan akademik dengan sebaik-baiknya. Dan juga penulis bergabung dalam organisasi lingkup internal dan eksternal kampus seperti; anggota BEM KEMA FAPERTA UNHAS, anggota MISEKTA UNHAS, anggota HMI, dan Anggota HIPERMAWA. Selain itu penulis turut aktif mengikuti berbagai seminar yang dilaksanakan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'aalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahii Rabbil Alamiin Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya. Tak lupa pula shalawat serta salam kepada junjungan Kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi tauladan bagi kita semua. Karena beliaulah hingga hari ini kita bisa menikmati nikmatnya ilmu pengetahuan.

Skripsi ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Pertanian (S.P) pada Program Studi Agribisnis, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Dengan judul **“Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi Di Kabupaten Wajo”**, di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, M.S. dan Ibu Dr. Ir. Nurbaya Busthanul, M.Si.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, menyadari keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, dengan penuh rendah hati penulis mengakui bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Makassar, 16 Juni 2022

Mukmin

PERSANTUNAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur atas berkat rahmat dan limpahan kasih sayang oleh Allah SWT, skripsi saya berjudul “**Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi Di Kabupaten Wajo**” telah terselesaikan. Tiada daya dan upaya melainkan hanya pertolongan dari Allah SWT semata. Pada kesempatan ini saya ingin menghaturkan penghargaan yang seutuhnya dan setinggi-tingginya saya berikan untuk kedua orang tua tercinta yaitu bapak Abdul Rasyid dan Ibu Ufe atas pengorbanan, kasih sayang, semangat dan dorongan serta motivasi dalam hidup yang telah diberikaan sejak kecil sampai sekarang.

Rasa hormat yang mendalam saya yang tiada ternilai dibandingkan doa serta pengorbanan kedua orang tua dalam mendampingi dan memberikan dukungan moril maupun materil bagi saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga untuk saudara saya, Arifuddin, Muh. Yunus, Asriadi, Ardi, Anda, Wahyuddin, dan Nurlindah serta para keluarga yang telah memberikan dukungan dan senantiasa menemani dalam perjalanan studi saya.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, bantuan, bimbingan, serta senantiasa membersamai hingga saat ini, khususnya kepada :

1. Kedua **pembimbing** saya, Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, M.S. dan Dr. Ir. Nurbaya Busthanul, M.Si. yang telah percaya pada saya dan membimbing saya dengan penuh rasa keikhlasan agar saya tidak salah langkah.
2. Terima kasih pula kepada kedua **penguji** saya, Prof. Dr. Ir. Mujahidin Fahmid, M.T.D. Dan Dr. Letty Fudjaja, SP., M.Si. yang telah menguji dengan saksama dan membantu skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
3. Terima kasih untuk seluruh **stakeholder** Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin; Khususnya Ketua Departemen, Ibu Dr. A. Nixia Tenriawaru, S.P., M.Si., dan Sekretaris Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Bapak Rusli M. Rukka, S.P., M.Si. atas segala hal yang diberikan selama saya menajalani perkuliahan hingga selesai mengerjakan skripsi ini.
4. Untuk teman-teman seperjuangan AFIN17AS angkatan 2017, yang saya cinta dan bagnggakan tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas persaudaraannya, persahabatan, dan kerjasamanya selama ini, saya bangga dapat menjadi bagian dari kalian.

5. Teman-teman KKN Gelombang 104 Unhas Wajo 1 Kecamatan Bola Ahmad Maldini, Muh. Irfan, St. Halijah, Esse dan Fitriani. Terima kasih atas kesan dan kerjasamanya.
6. Teman dari SMP-SMA Nurmilad Boarding School, Muh. Taqwin Syam, Yusran Yahya, Ahmad Rafiuddin, Kanda Amir Syam, Muh. Syafri Jaya. Terima kasih atas dukungannya motivasi yang selalu kalian berikan kepada saya.
7. Terima kasih kepada MISEKTA-ku yang kucinta yang telah menjadi wadah komunikasiku dan curahan bakat minatku. Terima kasih atas rumah dan pengalamannya.
8. Teman-teman MARIMAS. Terima kasih atas persaudaraannya, persahabatan, dan kerjasamanya selama ini.
9. Keluarga besar IKA Alumni NBS Sektor Makassar. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama di Makassar.
10. Teristimewa buat BSM (Beasiswa Sarjana Muamalat) yang telah membantu penulis dalam hal finansial dan pengembangan diri selama ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
11. Untuk teman seperbimbingan, terima kasih atas segala kebaikan dan bantuannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan kalian dibals oleh Allah SWT.
12. Kepada semua pihak yang mengenal penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan karya ini, terima kasih banyak dan mohon maaf karena tidak bisa disebut satu persatu.

Demikianlah dari penulis, semoga segala pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat kelak, Aamiin.

Makassar, 16 Juni 2022

Mukmin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PERSANTUNAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Analisis Kebijakan Publik.....	5
2.2 Kebijakan Pupuk Bersubsidi.....	6
2.3 Efektivitas Kebijakan.....	8
2.4 Efektivitas Subsidi Pupuk.....	9
2.5 Kerangka Pemikiran.....	12
III. METODE PENELITIAN.....	14
3.1 Desain Penelitian.....	14
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	14
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	14
3.4 Metode Penentuan Sampel.....	14
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	16
3.6 Metode Analisis Data.....	17

3.7	Konsep Operasional	21
IV.	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	23
4.1	Letak Geografis	23
4.2	Keadaan Demografis	23
	4.2.1 Penduduk	23
	4.2.2 Ketenagakerjaan	24
4.3	Keadaan Pertanian.....	25
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
5.1	Karakteristik Responden	26
	5.1.1 Umur.....	26
	5.1.2 Tingkat Pendidikan.....	27
	5.1.3 Luas Lahan Sawah.....	27
	5.1.4 Pengalaman Berusahatani.....	28
	5.1.5 Jumlah Tanggungan Keluarga	28
5.2	Prosedur Pelaksanaan Program Pupuk Subsidi	29
	5.2.1 Persiapan Dan Konsolidasi.....	29
	5.2.2 Perencanaan Dan Pencairan	30
	5.2.3 Distribusi Pupuk Subsidi	30
	5.2.4 Pengawasan	31
	5.2.5 Kartu Tani.....	33
5.3	Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk	33
	5.3.1 Tepat Harga	34
	5.3.2 Tepat Jumlah	36
	5.3.3 Tepat Waktu	36
	5.3.4 Tepat Tempat.....	37
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	39
6.1	Kesimpulan	39
6.2	Saran	39

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo (Hektar) 2019.....	15
Tabel 2.	Sampel Penelitian Petani Di Kecamatan Majauleng Dan Tempe	16
Table 3.	Kriteria Indikator Empat Tepat	18
Table 4.	Rumus Efektivitas Distribusi Pupuk Dengan Indikator Empat Tepat.....	19
Tabel 5.	Kriteria Penilaian Efektivitas	21
Tabel 6.	Kawasan Sentra Produksi Tanaman Pangan	25
Tabel 7.	Identitas Responden Berdasarkan Umur Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, 2021	26
Tabel 8.	Tingkat Pendidikan Formal Responden Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, 2021	28
Tabel 9.	Luas Lahan Responden Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, 2021	28
Tabel 10.	Pengalaman Berusahatani Responden Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, 2021	35
Tabel 11.	Jumlah Tanggungan Keluarga Responden Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, 2021	29
Tabel 12.	Mekanisme Pengawasan Pupuk Subsidi	32
Tabel 13.	Rata-Rata Harga Pupuk Subsidi Yang Digunakan Responden.....	35
Tabel 14.	Persentase Tingkat Ketepatan Harga Pupuk Subsidi.....	35
Tabel 15.	Persentase Ketepatan Jumlah Penggunaan Pupuk Subsidi.....	36
Tabel 16.	Persentase Tingkat Ketepatan Waktu Pupuk Subsidi.....	37
Tabel 17.	Persentase Tingkat Ketepatan Tempat Pupuk Subsidi	37
Tabel 18.	Persentase Tingkat Keefektifan Kebijakan Subsidi Pupuk Di Kabupaten Wajo	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	13
Gambar 2. Alur Prosedur Pelaksanaan Pupuk Subsidi.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner penelitian	45
Lampiran 2. Informasi data responden.....	49
Lampiran 3. Rekapitulasi jawaban responden berdasarkan 4 indikator	52
Lampiran 4. Rekapitulasi jawaban responden berdasarkan ketepatan harga	55
Lampiran 5. Rekapitulasi jawaban responden berdasarkan ketepatan jumlah.....	58
Lampiran 6. Rekapitulasi jawaban responden berdasarkan ketepatan waktu	61
Lampiran 7. Rekapitulasi jawaban responden berdasarkan ketepatan tempat	64
Lampiran 8. Gambar dokumentasi	67

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris, dimana menempatkan pertanian sebagai sektor utama dalam perekonomian, sehingga terdapat berbagai kebijakan pemerintah guna mendukung produksi sektor pertanian. Sektor pertanian harus diprioritaskan karena pertanian memberikan kontribusi untuk ketahanan pangan. Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pangan yaitu subsidi input produksi, kebijakan harga, dan pembenahan kelembagaan pangan. Salah satu kebijakan subsidi input produksi tersebut adalah kebijakan subsidi pupuk (Kholis, Setiaji, 2020).

Subsidi merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dengan membayar sebagian harga yang seharusnya dibayar oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu untuk memberi suatu barang atau jasa menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Salah satu subsidi disektor pertanian adalah subsidi pupuk. Pupuk bersubsidi merupakan bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk para petani guna untuk meningkatkan mutu dan hasil produksi dari hasil pertanian atau perkebunan di Indonesia. (Rigi, Raessi, & Azhari, 2019).

Menurut Bappenas dalam Zulaiha, Nurmalina, Sanim (2018), Kebijakan subsidi pupuk pertama kali ditetapkan sekitar tahun 1970-an dan terus mengalami penyempurnaan sehingga sampai ditetapkannya subsidi pupuk dengan sistem distribusi tertutup sampai sekarang. Subsidi pupuk dengan menggunakan pola tertutup dimulai pada tahun 2009, ditandai dengan diberlakukannya rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), yang dimana rencana definitif kebutuhan kelompok dari tiap wilayah dibuat terlebih dahulu untuk memudahkan pembuatan perkiraan kebutuhan volume pupuk dan kebutuhan biaya yang diperlukan.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas pangan yaitu melalui penerapan teknologi budidaya secara tepat dengan penggunaan sarana produksi sesuai teknologi yang direkomendasikan di masing-masing wilayah seluruh Indonesia. Salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian adalah pupuk. Dalam hal ini, program pupuk bersubsidi mengacu pada penggunaan pupuk yang efektif, yakni pemupukan yang berimbang sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan, dalam pemupukan yang berimbang sangat

dibutuhkan modal yang cukup akan tetapi pada umumnya kemampuan permodalan petani sangat terbatas dalam membiayai kebutuhan usahatani (Hariningtyas, 2014).

Dengan demikian, faktor penentu keberhasilan produksi padi yang menjadi mata pencaharian ekonomi keluarga bagi para petani adalah ketersediaan pupuk bersubsidi. Penggunaan pupuk yang tepat dapat meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, salah satunya produktivitas padi. Dengan kemudahan para petani padi dalam mendapatkan pupuk tentu akan membuat petani termotivasi untuk meningkatkan hasil produksi padi dengan melaksanakan penanaman dan perawatan yang lebih baik. Sedangkan ketiadaan pupuk di pasaran akan membuat petani mengalami kerugian karena hasil panen tidak akan maksimal bahkan tidak jarang karena kekurangan pupuk, tanaman padi tidak menghasilkan sebagaimana yang diharapkan oleh petani padi. Pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang subsidi pupuk sampai saat ini masih terus berjalan, dan diharapkan dapat memberikan dampak yang besar terhadap petani untuk membantu mengurangi beban biaya pupuk petani. Selain itu dengan adanya subsidi pupuk diharapkan berpengaruh positif terhadap sektor pertanian di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian (Tanjung, 2018).

Efektivitas kebijakan subsidi pupuk diukur berdasarkan enam indikator, yaitu tempat, jenis, waktu, jumlah, mutu, dan harga sehingga petani dapat menggunakan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Efektivitas subsidi pupuk menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan produksi padi. Efektivitas pada umumnya digunakan untuk mengukur bagaimana tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan (Mulyadiana, 2017).

Kebijakan subsidi pupuk juga tidak terlepas dari permasalahan seperti distribusi yang tidak adil dan tidak tepat sasaran, dualisme pasar, penggunaan pupuk yang berlebihan, biaya subsidi yang lebih besar dari manfaat, kurangnya pengawasan dan sanksi bagi para diskriminasi harga yang diterapkan antara subsektor tanaman pangan dan non pangan, membuka peluang terjadinya aliran pupuk dari subsektor tanaman pangan ke subsektor non pangan dan kecenderungan untuk di ekspor. Keadaan ini dapat dilihat dari terjadinya kelangkaan pupuk dari sektor tanaman pangan dan peningkatan harga pupuk di pasaran. Oleh karena itu diperlukan keberhasilan kebijakan subsidi pupuk, keberhasilan kebijakan ini adalah adanya kecocokan, bila metode pelaksanaan kebijakan dilakukan secara sistematis dalam artian sesuai dengan kebijakan subsidi pupuk, sebaliknya bila pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan ini statis, maka perlu adanya perbaikan metode yang lebih baik lagi atau bila perlu kebijakan tersebut

dihentikan. Efektivitas pada umumnya digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian efektivitas merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk melihat tercapai atau tidaknya tujuan atau program yang ditentukan.

Dari data observasi awal di Kabupaten Wajo, dalam proses pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi masih ditemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan indikator tepat subsidi pupuk. Masalah yang sering ditemui adalah adalah harga pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), serta tempat atau lokasi pengecer resmi yang masih jauh dari lokasi petani. Maka dari masalah-masalah tersebut dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan subsidi pupuk di Kabupaten Wajo.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi Di Kabupaten Wajo.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi kepada petani padi di Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana efektivitas kebijakan subsidi pupuk berdasarkan empat (4) indikator tepat keberhasilan pada petani padi di Kabupaten Wajo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan bagaimana prosedur pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi di Kabupaten Wajo.
2. Menganalisis bagaimana efektivitas kebijakan subsidi pupuk berdasarkan empat (4) indikator tepat keberhasilan pada petani padi di Kabupaten Wajo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dan untuk menambah wawasan disamping sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pertanian Universitas Hasanuddin.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait pupuk bersubsidi.
3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam memahami kebijakan subsidi pupuk selama ini dan juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
4. Bagi petani padi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi berkaitan dengan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Kebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan publik tersebut diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/ lembaga yang berwenang. Kesesuaian suatu kebijakan publik sangat tergantung kepada penilaian masyarakat. Pembahasan kebijakan publik tidak bisa lepas dari usaha untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut (Ramdhani, 2017).

Analisis kebijakan merupakan teknik untuk mengukur efektivitas organisasi melalui pemeriksaan dan evaluasi dampak suatu program. Analisis kebijakan memiliki tiga keprihatinan dasar. Pertama, perhatian utamanya adalah penjelasan dari kebijakan daripada resep kebijakan. Kedua, melibatkan pencarian yang ketat untuk mengetahui penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik melalui penggunaan alat penyelidikan sistematis. Ketiga, upaya untuk mengembangkan dan menguji proposisi umum tentang penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik (Hariningtyias, 2014).

Pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya: aspek kewenangan, sumberdaya, komunikasi, dan disposisi. Dimensi-dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Sementara itu evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komperhensif, yang meliputi: evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post. Dalam melakukan inovasi dan terobosan dalam peningkatan pelayanan kepada publik, dapat dilakukan diskresi pelaksanaan kebijakan publik sepanjang tidak bertentangan norma dan peraturan yang berlaku (Ramdhani, 2017).

2.2 Kebijakan Pupuk Bersubsidi

Kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan yang menjadi tulang punggung kebijakan subsidi bidang pertanian di Indonesia. Subsidi pupuk sudah menjadi komponen utama kebijakan subsidi bidang pertanian sejak program Bimas dan Inmas dilaksanakan pada tahun 1969. Penggunaan pupuk merupakan salah satu komponen Panca Usaha Pertanian yang merupakan batang tubuh dari program Bimas. Walau berfluktuasi, nilai subsidi terus meningkat tajam. Pada tahun 2003, nilai subsidi pupuk masih Rp900 miliar, kemudian meningkat pesat menjadi lebih dari Rp15 triliun pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu instrument penting dalam kebijakan pertanian yaitu subsidi pupuk (Susila, 2016).

Pupuk merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi tanaman. Pupuk sangat penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup tanaman. Di dalam pupuk terkandung berbagai unsur hara yang sangat penting bagi tanaman. Pemupukan tanaman dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk sintetis maupun pupuk organik. Pupuk sintetis yang sering digunakan petani adalah pupuk urea dan NPK, sedangkan pemupukan menggunakan pupuk organik masih jarang dilakukan. Penggunaan input kimiawi (pupuk dan pestisida sintetis) dengan dosis tinggi tidak hanya berpengaruh menurunkan tingkat kesuburan tanah, tetapi juga mengakibatkan pada merosotnya keanekaragaman hayati, meningkatnya serangan hama dan penyakit, timbulnya hama yang resisten dan berkembangnya organisme parasit (Raksun, Japa, & Mertha, 2019).

Pupuk bersubsidi menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang

ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran Pemupukan Berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Direktur Jenderal.

Jenis pupuk bersubsidi yaitu, pupuk (Urea, ZA, NPK) dan pupuk organik. Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005. Lingkup pengawasan mencakup pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah mutu, wilayah tanggungjawab, Harga Eceran Tertinggi (HET) dan waktu pengadaan dan penyaluran.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diatur oleh Kempmen Perindustrian Dan Perdagangan No: 356/Kep/5/2004, dimana pendistribusian pupuk bersubsidi telah diatur mulai dari lini I sampai dengan lini IV. Adapun pengertian lini I – lini IV berdasarkan Keputusan Menperindag No: 70/MPP/Kep/2/2003 yaitu, lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Lini II adalah lokasi gudang di wilayah ibukota Provinsi dan Unit Pengantoran Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan. Lini III adalah lokasi gudang distributor pupuk dan atau produsen di wilayah Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk/ditetapkan oleh produsen. Sedangkan lini IV adalah lokasi gudang pengecer yang ditunjuk/ditetapkan oleh distributor. Konsep pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi disusun secara terpadu dan menyatu dengan konsep perencanaan serta konsep pengadaan dan distribusinya. Pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara unsure petani/kelompok tani, unsure pemerintah dan stakeholder lainnya. Dalam implementasinya, KP3, bersama dengan PPNS dibantu oleh penyuluh pertanian di lapangan termasuk Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan dalam pasal 3 Permentan dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknik dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan pemerintah daerah, serta lokasi anggaran subsidi pupuk tahunan. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan. Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani, Pekebun, Peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.

Penyaluran pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani atau kelompok tani sebagai konsumen akhir. Pelaksanaan

pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyaluran lini IV (pengecer resmi) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Produsen, penyalur lini III dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip empat tepat (tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat harga sesuai dengan HET). Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai dengan lini IV di wilayah tanggungjawabnya. Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani sesuai dengan peruntukannya di lini IV wilayah tanggung jawabnya.

Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen, penyalur lini III (distributor), penyalur lini IV (pengecer resmi), dan komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) daerah berdasarkan prinsip enam tepat. Produsen pupuk bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai lini IV di wilayah tanggung jawabnya. Penyalur lini III (distributor) wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyimpangan, dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini III sampai dengan lini IV (pengecer resmi) setempat. Penyalur lini IV (pengecer resmi) wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan dan keadaan pertanaman serta penyediaan, penyimpanan, dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani setempat. KP3 daerah wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di daerah serta melaporkan kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada produsen selaku penanggungjawab wilayah. Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini IV ke petani atau kelompok tani dilakukan oleh KP3 di daerah bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan Tenaga Harian Lepas (THL) – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP), serta Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (TB-POPT), dan Ketua Gabungan Kelompok Tani.

2.3 Efektivitas Kebijakan

Kebijakan dapat dikatakan efektif jika dapat memberikan kontribusi untuk mencapai target yang ditetapkan oleh kebijakan. Efektivitas yang dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu system social mencapai tujuannya. Efektivitas berbeda dengan efisiensi. Efisiensi yaitu mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil. Sedangkan yang dimaksud dengan efektivitas yaitu secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan (Hariningtyias,2014)

Dalam hal keefektifan implementasi kebijakan pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi yaitu: Pertama, apakah kebijakannya sendiri itu sudah tepat, sejauhmana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua, tepat pelaksanaannya. Lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang di swastakan (*privatization* atau *contracting out*). Ketiga adalah tepat target. Ketepatan target berkenaan dengan tiga hal yaitu, (1) apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan.(2), apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi. (3), apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru. Keempat tepat yaitu tepat lingkungan, interaksi dengan lembaga lain yang terikat. Kelima tepat yaitu tepat proses, yang terdiri dari tiga proses yaitu *policy acceptance*, *policy adoption*, dan *strategic readiness* (Nuogroho dalam Hariningtyas, 2014).

2.4 Efektivitas Subsidi Pupuk

Efektivitas merupakan salah satu ukuran untuk menentukan keberhasilan suatu program/rencana. Tujuan dari ukuran efektivitas adalah besarnya hasil berupa output berbanding penggunaan masukan sebagai input. Oleh karena itu tujuan dari suatu program harus jelas agar pada akhirnya dapat diketahui apakah rencana dari suatu program tersebut terlaksana secara efektif (Ramlayana, Ansari, & Sudarmi, 2020).

Sebagai suatu program yang mempunyai target sangat luas, berbagai masalah dan kendala yang dihadapi dalam subsidi pupuk sehingga menurunkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan. Paling tidak ada tiga masalah penting dalam program subsidi pupuk, yaitu; 1) penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi, 2) kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan, dan 3) bias sasaran/target (Susila dalam Hariningtyas, 2014).

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencapai enam tepat penyaluran pupuk bersubsidi. Berkaitan dengan hal tersebut maka berikut ini penjelasan masing-masing enam tepat penyaluran pupuk bersubsidi:

a. Tepat Jumlah

Berdasarkan peraturan kementerian pertanian yang mengatur tentang alokasi pupuk bersubsidi, alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh pemerintah daerah provinsi dan alokasi anggaran subsidi pupuk. Pemerintah kementerian pertanian sudah mengalokasikan pupuk bersubsidi secara nasional tersebut berdasarkan provinsi, jenis, jumlah, sub-sektor, dan sebaran bulanan, dan selanjutnya

dirinci menurut Kabupaten/Kota (ditetapkan dengan peraturan Gubernur paling lambat pada awal bulan maret) dan menurut kecamatan (ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan maret). Saluran distribusi pupuk bersubsidi adalah : Produsen (Lini-I/II) - Distributor (Lini-III) - Penyaluran (Lini-IV) - Kelompok Tani/Petani. Menurut Rachman dalam Hariningtyas, (2014) pengertian tepat jumlah yaitu jumlah pemupukan yang dilakukan berdasarkan analisa status hara tanah dan kebutuhan tanaman. Jumlah pupuk tepat berdasarkan status hara dan kebutuhan tanaman yang dianjurkan adalah kombinasi antara urea 200 kg/ha, TSP/SP-36 sebanyak 75-100 kg/ha, dan KCL sebanyak 75-100 kg/ha.

b. Tepat Tempat

Pengertian tepat tempat berdasarkan dengan sumber yang sama yaitu suatu kondisi dimana pupuk tersedia di sekitar rumah atau lahan petani yang diindikasikan dengan pembelian pupuk oleh petani dilakukan di kios dalam desa. Produsen menunjuk distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat Kabupaten/Kota/Desa tertentu. Dimana distributor yang ditunjuk tersebut harus memenuhi persyaratan:

1. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum
2. Memiliki kantor dan pengurusan yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan ditempat kedudukannya
3. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Tempat Usaha (SITU) Perdagangan.
4. Memiliki dan menguasai saran gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.
5. Mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer disetiap kecamatan dan/atau Desa di wilayah tanggung jawabnya.
6. Rekomendasi dari dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukan distribusi baru.
7. Memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang disyaratkan oleh produsen.

Sedangkan distributor menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab di tingkat Kecamatan/Desa tertentu. Namun, penunjukan pengecer harus dengan persetujuan produsen. Nantinya setiap kelompok tani atau petani diharuskan membeli pupuk bersubsidi di pengecer resmi ini. Berikut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pengecer :

1. Bergerak dalam bidang perdagangan umum
2. Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya.
3. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing.
5. Memiliki pemodal yang cukup.

c. Tepat Harga

Pengertian tepat harga adalah suatu kondisi dimana harga pembelian pupuk oleh petani secara konstan di tingkat pengecer atau kios resmi persaknya sama dengan harga eceran tertinggi (Syafa'at dalam Hariningtyas, 2014). Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi, ditingkat Kecamatan atau Desa (Penyalur Lini IV). Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dilakukan dalam rangka mengendalikan harga pupuk yang beredar dipasaran agar petani tidak dipermainkan oleh para penyalur atau pengecer pupuk.

Untuk lokasi pengecer di *remote area*, maka produsen menjual langsung ke pengecer dengan ongkos angkut dari gudang produsen ke gudang pengecer menjadi tanggung jawab produsen dan penjualan pupuk ke pengecer di *remote area* melalui distributor terpercaya, dengan harga jual produsen ke distributor diturunkan agar HET di *remote area* tidak terlampaui (Hariningtyas, 2014).

d. Tepat Waktu

Pengertian tepat waktu berdasarkan sumber yang sama adalah suatu kondisi pupuk secara fisik tersedia pada saat dibutuhkan oleh petani. Setiap produsen harus menyiapkan stok pupuk di Gudang Lini III produsen untuk 2 kali ketentuan stok (1 bulan kemudian). Selanjutnya, dilakukan pengiriman pupuk bersubsidi tersebut kepada distributor resmi di masing-masing wilayah. Pelayanan ke distributor harus bersifat cepat, hal ini agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi.

Ketepatan waktu penyaluran pupuk bersubsidi juga ditentukan oleh ketepatan waktu penyusunan dan pengiriman RDKK. Proses pengadaan dan pengiriman RDKK sesuai kebutuhan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. RDKK setelah ditandatangani, diperbanyak rangkap 5 (lima) dan dikirim kepada Penyalur/Pengecer resmi (sebagai pesanan pupuk). Kepala Desa/Lurah, Ketua Gapoktan dan Ketua kelompok tani.
- b. RDKK disusun paling lambat awal bulan februari.
- c. RDKK dibuat rangkap 5 (lima), untuk : Pengecer pupuk bersubsidi resmi, Kepala Desa/Lurah, Ketua Gapoktan, Penyuluh dan arsip poktan
- d. RDKK dapat digunakan sebagai instrument pesanan pupuk bersubsidi di penyalur/pengecer resmi di Lini IV.

Kemudian, dari masing-masing Kelompok tani atau Gapoktan, RDKK tersebut diserahkan kepada pihak Kecamatan. Rekapitulasi RDKK tingkat Kecamatan disusun paling lambat bulan Maret. Rekapitulasi RDKK tingkat Kabupaten/Kota disusun paling lambat bulan April. Rekapitulasi RDKK tingkat Provinsi disusun paling lambat pada bulan Mei.

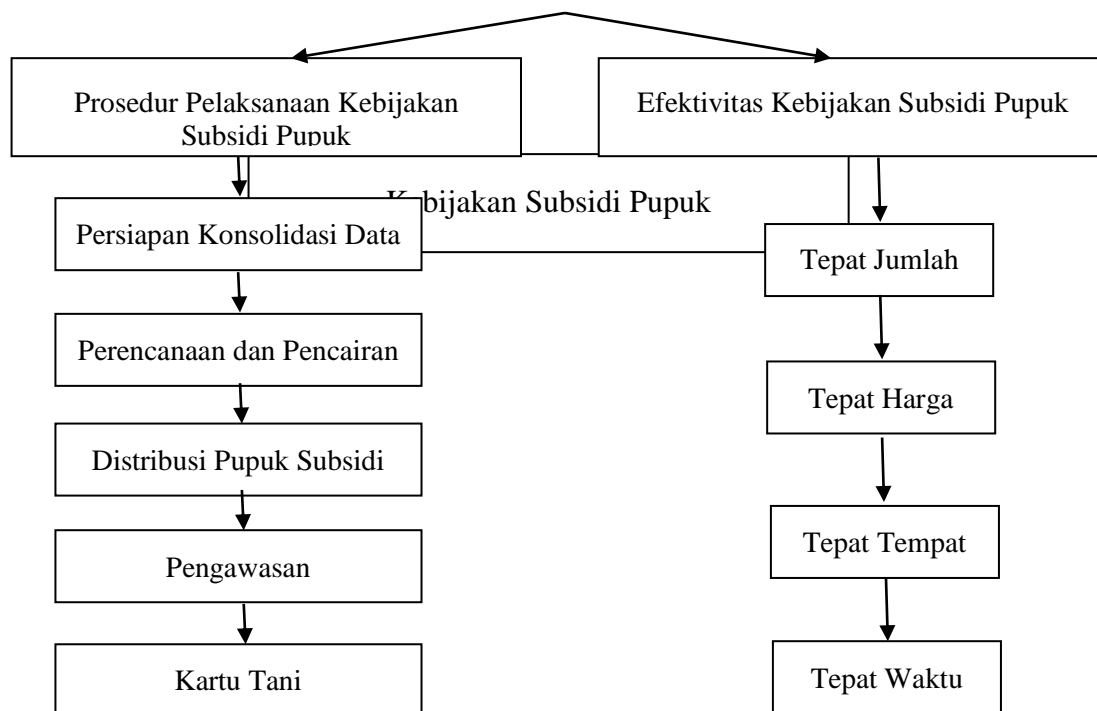
2.5 Kerangka Pemikiran

Peran pemerintah dalam mencapai sasaran swasembada berkelanjutan yaitu pemerintah memberikan dukungan utama yang berkaitan dengan subsidi input. Subsidi input tersebut terdiri dari subsidi pupuk, benih, dan kredit modal bagi petani. Subsidi pupuk dimaksudkan untuk menekan biaya produksi bagi petani terutama biaya pembelian pupuk. Pengadaan pupuk bersubsidi dilakukan dengan system rayonisasi, dimana produsen pupuk bersubsidi terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang Cikampek, PT. Pupuk Kaltim, dan PT. Pupuk Iskandar Muda. Setiap produsen harus bertanggungjawab terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di masing-masing wilayahnya sesuai dengan ketentuan. Penyaluran pupuk bersubsidi ini dimulai dari Lini 1 hingga sampai ketangan konsumen akhir yaitu petani. Artinya proses pendistribusian pupuk bersubsidi berlangsung cukup panjang dan diperlukan pengawasan yang ketat untuk menjamin tersalurkannya pupuk kepada petani. Indikator pupuk tersalurkan dengan baik yaitu berpegang pada prinsip enam tepat yang telah diatur dalam peraturan peundang-undang. Tugas pengawasan pupuk ini dibebankan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang ada di masing-masing kabupaten/kota.

Tingkat efektivitas kebijakan subsidi pupuk diukur berdasarkan enam indikator tepat. Menurut Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 indikator-indikator efektivitas subsidi pupuk adalah tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, dan

tepat mutu. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini terfokus pada empat indikator tepat yaitu harga, tempat, waktu, dan jumlah. Pemilihan empat indikator ini disebabkan karena empat indikator tersebut dapat dikuantifikasikan sehingga dapat diinterpretasikan. Sedangkan indikator tepat jenis sudah sesuai dengan yang dibutuhkan petani untuk produksi dan indikator tepat mutu tidak ada masalah dilapangan karena mutu sesuai dengan yang petani harapkan tidak ada pengoplosan pupuk.

Pada penelitian ini peneliti akan meneliti mengenai prosedur penyaluran kebijakan subsidi pupuk dan efektivitas kebijakan subsidi pupuk di Kabupaten Wajo. Untuk mengetahui efektivitas subsidi pupuk yang dilakukan oleh peneliti adalah menghitung efektivitas kebijakan dilihat dari empat indikator, yaitu tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat tempat. Hasil dari perhitungan masing-masing indikator ditunjukkan dalam persen (%) selanjutnya dari keseluruhan indikator tersebut dihitung rata-ratanya sehingga diketahui persen (%) efektivitas subsidi pupuk secara keseluruhan. Efektivitas subsidi pupuk dikatakan efektif jika nilai presentase efektivitas (k) yaitu $k \geq 80\%$. Untuk bagan kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran Kebijakan Subsidi Pupuk

Keterangan : \longrightarrow Menyatakan Alur